

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026
2023

PERWAL NO. 84, BERITA DAERAH 2023/NO. 84, 50 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL TAHUN 2023-2026

- ABSTRAK:
- dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal bagi masyarakat diperlukan upaya yang terencana, sinergi dan berkelanjutan serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah membentuk rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minima
 - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - peraturan wali kota semarang tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana terdiri dari: a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah; c. BAB III : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM; d. BAB IV : Strategi dan Pemenuhan Penarapan SPM; e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM; dan f. BAB VI : Kesimpulan dan Saran.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023
Lampiran 44 halaman